

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

Data hasil penelitian oleh penulis diperoleh dari lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan narasumber guna mendapatkan keterangan secara langsung mengenai topik penelitian.

#### **1.1 Issue-Issue Politik**

Dewasa ini, di satu sisi politik berada di era mediasi (*politics in the age of mediation*) sedangkan di sisi lain peristiwa politik, tingkah laku dan pernyataan para aktor politik, sekalipun bersifat rutin, selalu mempunyai nilai berita sehingga banyak diliput oleh media massa (Hill, 1995). Liputan politik juga cenderung lebih rumit ketimbang reportase bidang kehidupan lainnya. Pada satu pihak, liputan politik memiliki dimensi pembentukan pendapat umum (*public opinion*), baik yang diharapkan oleh para politisi maupun oleh para wartawan.

Karenanya, berita politik bisa lebih dari sekadar reportase peristiwa politik, tetapi merupakan hasil konstruksi realitas politik untuk kepentingan opini publik tertentu. Dalam komunikasi politik, aspek pembentukan opini inilah yang justru menjadi tujuan utama, karena hal ini akan mempengaruhi pencapaian-pencapaian politik para aktor politik (McNair, 1995 dan Nimmo, 1978).

Penulis berkesempatan mewawancarai beberapa Taruna/i sebagai responden penelitian ini dan satu dari tiga instrument pertanyaan yang disajikan ialah tentang issue-issue politik terkini dalam menghadapi pemilu Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2017. Penulis membandingkan pernyataan mereka yang dihadapkan dengan dua issue, yaitu issue politik agama dan issue politik nasionalis kebangsaan.

### **1.1.1 Issue Politik Agama**

Menurut Dion Saputra Prayoga Hermawan, Taruna dari jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI) saat diwawancarai pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 pukul 11:30 WIB di *front office* SMK Negeri 4 Pangkalpinang tentang apakah issue politik agama yang sedang terjadi kala itu di Provinsi DKI Jakarta juga terbawa dan memberikan pengaruh-pengaruh tertentu pada pemilu di Provinsi Kep. Bangka Belitung, Dion mengatakan bahwa apa yang terjadi tentang issue politik agama di DKI Jakarta yang mendera Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sama sekali tidak terjadi di Bangka Belitung dan tidak memberikan pengaruh yang strategis.

Hal tersebut dikarenakan apa yang terjadi di DKI Jakarta dengan yang terjadi Bangka Belitung sama sekali berbeda dan tidak ada kaitanya sama sekali sehingga dalam menentukan pilihannya untuk pemilu di Provinsi Kep. Bangka Belitung Dion tidak memperdulikan tentang suku, agama, ras

maupun antar golongan dari calon pemimpin melainkan melihat kinerja dan rekam jejak dari sosok yang akan dipilih.

Kasus ini bermula ketika Ahok berkunjung ke Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu pada bulan September 2016. Kunjungan tersebut dalam rangka Program Kerja sama Pemprov DKI dengan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) untuk budidaya perairan. Di dalam video yang diunggah oleh Sie Publikasi dan Dokumentasi, Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan, Pemprov DKI Jakarta, dalam pidatonya Ahok mengatakan dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 5. Kemudian video tersebut diunggah kembali oleh Buni Yani pada tanggal 5 Oktober 2016.

Selain itu, saat diwawancarai secara terpisah di *lobby* SMK Negeri 4 Pangkalpinang pada Selasa tanggal 07 November 2017, Wahaidatul Lailia secara langsung mengatakan bahwa akan memilih pemimpin yang satu agama dengannya yaitu Islam sesuai dengan keyakinan yang dia yakini, namun ketika dihadapkan dengan pilihan antara pemimpin muslim tanpa kinerja atau pemimpin yang biasa dengan pemimpin beda agama yang memiliki kinerja seperti issue yang biasa digemakan di DKI Jakarta, maka dengan santai dia menjawab akan memilih pemimpin dengan kinerja yang menjanjikan meski beda agama.

Dari pemaparan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa para Taruna/I tidak melihat dan terpengaruh terhadap agama apa yang dianut oleh calon pemimpin dalam memilih Gubernur pada Pilkada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017. Para Taruna/i menjadikan kinerja sebagai tolak ukur dan pertimbangan dalam memilih Gubernur, hal ini dibuktikan ketika seorang Taruni yang menyatakan dirinya akan memilih pemimpin muslim yang satu agama dengan dirinya, tetapi ketika dihadapkan dengan pilihan antara pemimpin muslim tanpa kinerja atau pemimpin yang biasa dengan pemimpin beda agama yang memiliki kinerja, dengan santai dia menjawab akan memilih pemimpin dengan kinerja yang menjanjikan meski beda agama.

### **1.1.2 Issue Politik Nasionalisme Kebangsaan**

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai sebagian paham negara atau gerakan (bukan negara) yang populer berdasarkan pendapat warga negara, etnis, budaya, keagamaan dan ideologi. Kategori tersebut lazimnya berkaitan dan kebanyakan teori nasionalisme mencampuradukkan sebahagian atau semua elemen tersebut. James G Kellas (Azmy, 2016) memaknai nasionalisme sebagai:

*“Nasionalisme merupakan sebuah ideologi dan bentuk perilaku. Ideologi nasionalisme dibangun di atas masyarakat yang memiliki kesadaran berbangsa (kesadaran diri nasional) yang ditunjukkan dengan sikap dan aksi, dalam bentuk budaya, ekonomi atau politik. Nasionalisme membangun kesadaran rakyat sebagai suatu bangsa serta memberi seperangkat sikap dan program tindakan.”*

Tingkah laku seorang nasionalis didasarkan pada perasaan menjadi bagian dari suatu komunitas bangsa. Anthony D. Smith (Azmy, 2016) mengemukakan nasionalisme sebagai berikut:

*“sebuah ideologi, nasionalisme memiliki sasaran untuk mencapai pemerintahan yang kolektif, penyatuan wilayah, dan identitas budaya, juga kerap kali mempunyai program politik dan budaya yang jelas untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.”*

Pemahaman tersebut berkaitan dengan sasaran nasionalisme itu sendiri yaitu dicapainya otonomi nasional, kesatuan nasional dan identitas nasional yang disatukan dalam sebuah pemahaman mengenai sebuah bangsa yang aktual dan bangsa yang potensial. Komponen utama pembahasan mengenai nasionalisme adalah konsep mengenai bangsa dan kelompok etnis yang menjadi subyek sekaligus obyek dari nasionalisme itu sendiri.

Ketika penulis menyajikan issue politik nasionalisme kebangsaan kepada responden tentang apakah pemimpin yang akan dipilihnya harus berasal dari golongan tertentu salah satunya yaitu dari unsur militer atau tidak, Dion Saputra Prayoga Hermawan, Taruna dari jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI) saat diwawancarai pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 pukul 11:30 WIB di *front office* SMK Negeri 4 Pangkalpinang mengatakan sebagai berikut:

*“bahwa pemimpin dari unsur militer tidak dapat memberikan jaminan kalau dia akan dipilih. Ketegasan dan kharisma dari seorang pemimpin justru terkadang dapat menjadi bumerang tersendiri dalam memimpin sebuah daerah atau bahkan sebuah negara.”*

Dion juga membandingkan gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang bukan berasal dari unsur militer namun memiliki ketegasan dengan gayanya sendiri ketika kala itu Malaysia memasang bendera Indonesia secara terbalik saat ajang SEA GEAMS Tahun 2017. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk memberikan nota protes dan meminta konfirmasi dari Malaysia merupakan bentuk ketegasan dengan gayanya sendiri dan itu dinilai cukup tanpa harus memilih orang yang berasal dari unsur militer.

Disisi lain senada meski tak sama, Gom Gom Welsing Manurung seorang Taruna dari jurusan Nautika Kapal Niaga saat diwawancarai pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 di Markas Besar Gerakan Pramuka Gugus Depan SMK Negeri 4 Pangkalpinang pada pukul 18:00 WIB, menilai bahwa tidaklah strategis dan cukup menarik perhatian jika hanya memandang kelompok atau golongan tertentu seperti agama dan latar belakang militer untuk dapat menentukan pilihannya saat pemilu tetapi menjadikan kinerja sebagai tolak ukur yang utama untuk dapat memilih pemimpin yang dapat dipercaya agar bisa membawa perubahan sesuai dengan harapan para pemilih. Kinerja menjadi bukti nyata bagi seseorang untuk membuktikan dan menyampaikan bahwa dirinya punya kualitas dan kompeten.

Dari pemaparan terkait dengan issue politik agama dan issue politik nasionalisme kebangsaan yang memberikan fragmentasi berpikir dikalangan masyarakat terlebih pada pemilih pemula, maka diperlukan pendidikan demokrasi sedari awal bagi Taruna/i untuk dapat melihat secara keseluruhan dengan penilaian yang objektif dalam mengambil sikap politik. Pendidikan Demokrasi adalah esensinya pendidikan kewarganegaraan (PKn). PKn itu sendiri bagian dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS). PIPS memiliki tiga tradisi seperti dikatakan oleh Barr, Barth dan Shermis (Soemantri, 2001:81) "*The Three Social Studies Traditions*" yaitu:

- a. *Social Studies as Citizenship Transmissions (Civic Education)*,
- b. *Social Studies as Social Science*,
- c. *Social Studies as Reflective Inquiry*.

Kaitan dengan tradisi pertama yaitu “*social studies as citizenship transmission*”, menunjukkan bahwa PIPS sebagai *Citizenship Education* atau Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Kewarganegaraan sebagai wahana utama dan esensi dari pendidikan demokrasi (CICED, 1999). Dengan kata lain bahwa pendidikan demokrasi sebagai muatannya, pendidikan kewarganegaraan sebagai kendaraannya, sedangkan PIPS sebagai jembatan pendidika ilmu-ilmu sosial yang bertujuan pendidikan.

Kaitannya dengan tradisi kedua “*social studies associal science*” atau PIPS sebagai ilmu-ilmu sosial. Secara logika pendidikan demokrasi itu sendiri merupakan turuna dari ilmu politik yang bertujuan pendidikan yang ditopang ole ilmu-ilmu sosial secar inter disipliner, walaupun terjadi tarik-menarik antara PIPS perlu diajarkan secara terpadu dan secar terpisah. Kaitan dengan tradisi ketiga “*socialstudie as reflective inquiry*” bahwa sosial studies cenderung unutm melatih keterampilan “*reflective thinking*” (Barrdkk, 1977:37).

Dengan kata lain pembelajaran demokrasi dilingkup sekolah dapat meningkatkan kemampnan Taruna/i menganalisis isu-isu demokrasi yang muncul di masyarakat menambah kemampuan nalar Taruna/i dalam pengetahuan kemasyarakatan (*socio-scientific reasoning*), mengembangkan keterampilan berpikir (*higher-orderthinking skill*), termasuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, membuat, menganalisis dan kritis, mengembangkan kesadaran peran Taruna/i dalam proses dari perubahan demokrasi, membantu Taruna/i mengakui kompleksnya dari membuat keputusan masalah demokrasi, menyediakan kesempatan Taruna/i untuk menguji kemungkinan dampak demokrasi bagi kehidupan dan perubahan masyarakat.

Dari pemaparan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemimpin dari unsur militer tidak dapat memberikan jaminan kalau dia akan dipilih. Ketegasan dan kharisma dari seorang pemimpin justru terkadang dapat menjadi bumerang tersendiri dalam memimpin sebuah daerah, selain itu tidaklah strategis dan cukup menarik perhatian jika hanya memandang latar belakang militer untuk dapat menentukan pilihannya saat pemilu melainkan menjadikan kinerja sebagai tolak ukur yang utama.

## 1.2 Kandidat yang Diajukan

### 1.2.1 Komunikasi Politik Kandidat

Ada beberapa kandidat yang mencalonkan diri sebagai Cagub Bangka Belitung tahun 2017. Dari beberapa kandidat tersebut Reza Saputra, Taruna dari jurusan Nautika Kapal Niaga (NKN) saat diwawancarai pada hari Jum'at tanggal 10 November 2017 pukul 16:00 WIB di kelas XII NKN SMK Negeri 4 Pangkalpinang mengatakan bahwa:

*“secara pribadi saya pribadi memilih Erzaldi-Fattah karena dulunya Bapak Erzaldi adalah Bupati Bangka tengah dan dia telah terpilih selama 2 periode menjadi Bupati Bangka tengah. Selama beliau menjabat sebagai Bupati Bangka tengah saya lihat kinerja yang sangat bagus dan merakyat langsung, tidak jarang juga beliau sering mengadakan event sederhana seperti jalan santai berhadiah, 17 agustus, Erzaldi Cup dalam tournament sepak bola antara RT, itulah yang menjadi daya tarik Pak Erzaldi terhadap rakyatnya.”*

Lanjutnya dalam wawancara tersebut, Rheza mengatakan bahwa sosok Pak Erzaldi sudah familiar dikalangan masyarakat dan beliau pun dikenal ramah kepada masyarakat serta tidak enggan untuk membantu masyarakat yang membutuhkannya. Pak Erzaldi sosok pemimpin yang luar biasa, beliau banyak membantu masyarakat yang kurang mampu. Berdasarkan persepsi tersebut responden menilai Pak Erzaldi sangat baik dalam kinerja serta dalam mengatasi masalah.

Pak Erzaldi juga dinilai sebagai pemimpin yang pro generasi muda. Untuk menyerap dan mengetahui keinginan dan harapan generasi muda membuat Pak Erzaldi selalu menyempatkan diri untuk berdialog dengan generasi muda dibangka Belitung. Contohnya seperti memenuhi undangan dari komunitas *stand up* Indo Pangkalpinang di Cheng Café.

Dalam spekulasi personalnya, penulis menyimpulkan bahwa persepsi kinerja yang dimaksudkan oleh Rheza ialah kemampuan komunikasi politik sang Bupati Bangka Tengah kala itu. Sosoknya yang dapat hadir dan bersifat terbuka kepada masyarakat merupakan nilai tambah yang dapat menarik perhatian dan ketertarikan massa untuk melihatnya. Komunikasi politik melekat di masyarakat ketika mendiskusikan kegiatan politik secara langsung, melalui media massa utama maupun media alternatif yang semakin mudah diakses karena dukungan teknologi komunikasi.

Menurut Nimmo (Sasmita, 2012), komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol, sedangkan politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana, pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang, kekuasaan dan pemegang kekuasaan, pengaruh dan tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan atau memperluas tindakan lainnya.

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah (Surbakti dalam Sasmita, 2012). Komunikasi politik adalah proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Kejadian tersebut merupakan proses yang berkesinambungan, melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan masyarakat.

Komunikasi politik memainkan peranan yang penting sekali didalam sistem politik, komunikasi politik menentukan elemen dinamis dan menjadi bagian yang menentukan sosialisasi politik, partisipasi politik, dan perekrutan politik (Rush dan Althoff dalam Sasmita, 2012). Dampak komunikasi politik seperti citra politik dan pendapat umum serta efek distribusi partisipasi politik yang dapat diukur adalah hasil pemungutan suara dalam pemilihan umum. Strategi komunikasi politik yang harus digunakan ialah merawat ketokohan sebagai pahlawan politik, membesarkan partai, menciptakan kebersamaan serta membangun konsensus berdasarkan visi, misi dan program politik yang jelas.

Kegiatan pemilihan umum yang berkaitan langsung dengan komunikasi politik ialah kampanye dan pemungutan suara. Kampanye pemilihan umum merupakan suatu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby* dan lain-lain kegiatan. Meskipun propaganda dinegara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik. Hakikat strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan.

Karena pada kenyataannya keberadaan pemimpin politik sangat dibutuhkan dalam setiap aktivitas kegiatan komunikasi politik, setelah itu langkah yang tepat bagi seorang komunikator politik untuk mencapai tujuan politik ke depan antara lain dengan merawat ketokohan yang telah melekat pada diri komunikator politik tersebut serta memantapkan kelembagaan politiknya. Kepercayaan publik menguat terhadap seorang calon kepala daerah didukung oleh pola komunikasi politik untuk menarik perhatian khalayak. Sejalan dengan itu, Nimmo (2006:8), menyebutkan:

*“komunikasi politik merupakan komunikasi yang mengacu pada kegiatan politik”.*

Jadi setiap diskursus yang mengandung bobot politik identik dengan komunikasi politik.

Tentu saja kegiatan politik dalam arti luas mencakup pula diskusi terhadap peran pemerintah yang berkuasa dan terlibat langsung dalam suatu aktivitas politik untuk menggalang kekuatan dan mempengaruhi khalayak untuk mengikuti apa yang dikehendaki. Dalam pemberitaan tentang pilkada Bangka Belitung, menunjukkan bahwa komunikasi politik memang diperlukan dalam kekuasaan, “Gubernur Provinsi Babel periode 2012-2107, Rustam Effendi yang mencalonkan diri kembali masih ngotot untuk meminang Maulana Akil (Molen) menjadi calon wakil gubernur karena dirinya sangat membutuhkan seorang birokrat sebagai pendamping. Rustam juga terus melakukan komunikasi politik, bahkan Rustam mengklaim Partai Demokrat terus didekati dan mulai merapat dengan PDIP”.

Sudut pandang Rheza tentang bagaimana seorang pemimpin dapat hadir ditengah masyarakat merupakan penilaian yang prematur untuk melihat kinerja seorang pemimpin. Perlu ada pertimbangan yang rasional, sistematis serta menyangkut aspek sosiologis, filosofis hingga politis untuk dapat melihat bagaimana kinerja seorang pemimpin, meskipun demikian sebagai seorang peneliti muda yang tetap menjaga profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas dalam hal ini menghormati dan menghargai semua pendapat yang telah disampaikan oleh Rheza yang kala itu berhadapan langsung dengan konstelasi politik daerah Bangka Belitung.

Dari pemaparan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi kinerja yang dimaksudkan oleh Rheza ialah kemampuan komunikasi politik sang Bupati Bangka Tengah kala itu. Perlu ada pertimbangan yang rasional, sistematis serta menyangkut aspek sosiologis, filosofis hingga politis untuk dapat melihat bagaimana kinerja seorang pemimpin.

### **1.2.2 Kemampuan Memimpin Birokrasi**

Saat diwawancarai secara terpisah di kelas XII TPHPI SMK Negeri 4 Pangkalpinang pada hari Jum'at tanggal 10 November 2017, Aditya Dwi Putra seorang Taruna dari jurusan Agribisnis Perikanan (AP) sempat menyampaikan informasi dari ketua survey laboratorium psikologi politik (LPP) Universitas Indonesia, Hamdi muluk pernah mengatakan sampai saat ini pasangan Erzaldi Rosman-Fatah masih menjadi yang terkuat. Palsalnya beberapa waktu lalu survey elektabilitas untuk Erzaldi seorang saja sudah mencapai 42%, unggul jauh diatas calon lain.

Secara spesifik, lebih lanjut Aditya Dwi Putra menyatakan bahwa:

*“Erzaldi jelas akan unggul karna memiliki kerja birokrasi yang baik. Birokrasi yang dimaksud ialah birokrasi yang disiplin dalam segala aspek kepegawaian mulai dari pelayanan yang menggunakan prinsip Good Governance, bekerja pada waktunya secara profesional mulai dari jam masuk kantor hingga jam pulang kantor yang tepat waktu.”*

Birokrasi merupakan instrument penting dalam masyarakat modern yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Eksistensi birokrasi ini sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara (pemerintahan) untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Negara dituntut terlibat dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya baik secara langsung maupun tidak, bahkan dalam keadaan tertentu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya.

Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi. Kegiatan pemerintahan diatur oleh suatu sistem aturan main yang abstrak. Aturan main itu merumuskan lingkup tanggung jawab para pemegang jabatan diberbagai posisi dan hubungan di antara mereka. Aturan-aturan itu juga menjamin koordinasi berbagai tugas yang berbeda dan menjamin keseragaman pelaksanaan berbagai kegiatan itu.

Operasi kegiatan dalam birokrasi dilaksanakan berdasarkan sistem aturan yang ditaati secara konsisten. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya rasa tanggung jawab masing-masing anggota organisasi bagi pelaksanaan tugasnya. Konsep Birokrasi dirancang untuk menjamin adanya keseragaman dalam melaksanakan setiap tugas tanpa memandang jumlah personil yang melaksanakan dan koordinasi tugas – tugas yang berbeda-beda.

Aturan–aturan yang eksplisit tersebut menentukan tanggung jawab setiap anggota organisasi dan hubungan diantara mereka, namun tidak berarti bahwa kewajiban birokrasi sangat mudah dan rutin. Tugas–tugas birokrasi memiliki kompleksitas yang bervariasi, dari tugas–tugas klerikal yang sifatnya rutin hingga tugas–tugas yang sulit.

Kepemimpinan birokrasi atau lebih tepat kepemimpinan dalam institusi pemerintah, seharusnya menjadi perhatian utama institusi negara pasca reformasi, sebab model kepemimpinan birokrasi di Indonesia yang dilembagakan seringkali mengarah upaya membangun jaringan komunikasi kekuatan aparatur pemerintah untuk menguasai rakyat secara sosial, ekonomi maupun politik. Birokrasi bagi sebagian orang dimaknai sebagai prosedur yang berbelit-belit, menyulitkan dan menjengkelkan.

Selama ini pandangan negatif disematkan pada birokrasi karena birokrasi dianggap sebagai alat untuk memperoleh, mempertahankan dan melaksanakan kekuasaan. Birokrasi adalah sesuatu yang penuh dengan kekakuan dan kemandegan structural, tatacara yang berlebihan, penyimpangan sasaran, sifat pengabaian serta menutup diri terhadap perbedaan pendapat.

Kehadiran Erzaldi dengan merubah paradigma birokrasi kedalam fragmentasi yang positif membuat dirinya mendapat nilai tambah sebagai seorang pemimpin. Pemahaman birokrasi dari perspektif yang positif yakni sebagai upaya untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat agar lebih tertib. Ketertiban yang dimaksud adalah ketertiban dalam hal mengelola berbagai sumber daya yang mendistribusikan sumber daya tersebut kepada setiap anggota masyarakat secara berkeadilan.

Secara positif birokrasi sebagai alat yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu, dengan adanya alat yang efisien dan efektif ini maka tujuan suatu organisasi lebih mudah tercapai. Mencermati kondisi tersebut dan berpijak kepada demokratisasi dalam komunikasi maupun niat untuk memberikan pelayanan kepada publik yang lebih baik, Erzaldi melakukan reformasi birokrasi dengan menjadikan organisasi pemerintah yang mampu menciptakan komunikasi integratif dengan masyarakat sebagai entitas yang wajib dilayani.

Dalam upayanya meningkatkan pelayanan kepada publik dan menciptakan kekuatan masyarakat madani, kehadiran Erzaldi menunjukan kepemimpinan birokrasi yang mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Kepemimpinan dalam perspektif komunikasi adalah suatu kegiatan komunikasi untuk mempengaruhi orang-orang supaya dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Esensinya, unsur-unsur yang menonjol dalam kepemimpinan adalah kemampuan berkomunikasi untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok dengan cara yang tidak memaksakan kehendak. Tetapi kegiatan mempengaruhi sebagai satu hal yang tidak mudah dilakukan karena berbagai macam kendala yang dipunyai pemimpin maupun pengikut sehingga pada pemimpin dalam lembaga pemerintah seringkali menggunakan aspek kekuasaan legal formal untuk memaksa agar masyarakat mengikuti apa kemaunannya.

Jika kepemimpinan birokrasi pemerintahan dilakukan dengan merujuk kepada pengertian ideal tentang kepemimpinan, maka hubungan antara pemerintah dengan rakyat dapat berjalan dengan baik. Pemimpin yang berhasil adalah mereka yang selain memiliki kemampuan pribadi tertentu, juga mampu membaca keadaan anak buah dan lingkungannya.

Model ini bertitik tolak dari pendekatan situasional yang berpedoman pada tidak ada gaya kepemimpinan yang selalu efektif untuk diterapkan dalam setiap situasi, gaya kepemimpinan akan efektif jika disesuaikan dengan tingkat kematangan atau kemampuan anak buah. Dalam hal perbandingannya dengan instansi di wilayah Pemerintahan Daerah lainnya, sudah menjadi rahasia umum ketika terdapat Aparatur Sipil Negara yang datang melebihi jam masuk kantor dan pulang sebelum jam pulang kantor.

Hal tersebut terbukti memberikan pengaruh kepada para pemilih pemula untuk dapat menentukan pilihannya karena selain melihat kinerja Aditya Dwi Putra juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Erzaldi merupakan pendidikan karakter yang baik bagi pegawai. Kemampuannya untuk dapat menjaga kualitas pelayanan Aparatur Sipil Negara terbukti secara tidak langsung juga telah menjaga kepercayaan publik pada dirinya yang dinilai memiliki kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan.

Jika dibandingkan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga merupakan putra daerah Bangka Belitung yaitu Basuki Tjahaja Purnama, Adit begitu panggilan akrabnya mengatakan bahwa antara Erzaldi dengan Basuki alias Ahok memiliki kesamaan dalam hal membina Aparatur Sipil Negara untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.

Selain itu, kinerjanya dalam membangun daerah juga tak luput dari sorotan, hanya terpadat satu hal yang membedakan kehadiran dan kemampuan Erzaldi dengan Ahok, yaitu kemampuannya dalam bersikap dan berperilaku. Erzaldi memiliki kemampuan untuk dapat mengontrol dirinya dalam bertindak dan berperilaku yang nyatanya hal tersebut memberikan nilai tambah bagi Erzaldi sebagai seorang pemimpin.

Dari pemaparan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan Erzaldi sebagai Bupati Bangka Tengah kala itu yang dapat menjaga kualitas pelayanan Aparatur Sipil Negara terbukti secara tidak langsung juga telah menjaga kepercayaan publik pada dirinya yang dinilai memiliki kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan.

Birokrasi yang dimaksud ialah birokrasi yang disiplin dalam segala aspek kepegawaian mulai dari pelayanan yang menggunakan prinsip *Good Governance*, bekerja pada waktunya secara professional mulai dari jam masuk kantor hingga jam pulang kantor yang tepat waktu.”

### **1.2.3 Kinerja**

Kinerja merupakan sebuah tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu (Widodo dalam Mardiana, 2014). Sedangkan menurut Foster dan Seeker dalam Mardiana (2014) mengatakan kinerja merupakan hasil dari capaian seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk sebuah pekerjaan. Jadi kinerja adalah sebuah capaian lebih dari sebuah hasil yang diperoleh atas tugas yang telah dikerjakan.

Penilaian kinerja yang baik adalah yang mampu menciptakan gambaran yang tepat mengenai orang yang dinilai. Penilaian tidak hanya ditujukan untuk menilai dan memperbaiki kinerja yang buruk, namun juga mendorong untuk bekerja lebih baik lagi. Berkaitan dengan hal ini, penilaian kinerja membutuhkan standar pengukuran, cara penilaian dan analisa data hasil

pengukuran, serta tindak lanjut atas hasil pengukuran yang matang dan perhitungan yang presisi. Sebagai seorang pemimpin tidaklah cukup hanya dengan melihat proyek yang direncanakannya berhasil sebagai tolak ukur untuk mengatakan bahwa dia memiliki kinerja, tentu penilaian tersebut akan bersifat subjektif dan prematur. Penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi, apapun bentuk atau metode penilaian yang dilakukan harus adil, realistis, valid, dan relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai.

Menurut Arahma Sindita, salah seorang Taruni saat diwawancarai pada hari Senin tanggal 13 November 2017, bertempat di Markas Komando Gerakan Pramuka Gugus Depan SMK Negeri 4 Pangkalpinang menyatakan pilihannya lagi-lagi kepada Erzaldi, dia mengatakan bahwa beliau pernah memimpin sebagai Bupati di daerah Bangka Tengah selama dua periode dan kinerja beliau pada saat memimpin di Bangka Tengah cukup bagus beliau banyak membuat perubahan di Bangka Tengah.

Lebih lanjut Arahma Sindita mengatakan bahwa:

*“saya yakin beliau juga bisa membuat perubahan di Kep.Bangka Belitung. Beliau berjanji jika terpilih menjadi Gubernur Kep.Bangka Belitung maka sekolah negeri yang ada di daerah Kep.Bangka Belitung tidak ada pungutan uang sekolah (Sekolah di gratiskan dari uang komite) dan dari situ anak yang kurang mampu untuk membayar uang sekolah akan merasa terbantu dan mereka akan lebih nyaman bersekolah tanpa harus terbebani tagihan uang sekolah setiap bulan.”*

Meski demikian Arahma menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh Erzaldi sebagai Bupati Bangka Tengah kala itu telah cukup untuk membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang memiliki kinerja yang memuaskan bagi masyarakat. Tidak hanya kala menjabat sebagai Bupati Bangka Tengah kala itu, setelah menjabat sebagai Gubernur Arahma melihat apa yang dilakukan oleh Erzaldi dalam perihal keagamaan juga dianggap sebagai bentuk kesuksesan kinerja beliau. Lebih lanjut Arahma Sindita mengatakan bahwa:

*“...bahkan pada saat bulan Ramadhan beliau pernah mengundang Ustadz dari mesir untuk menjadi imam pada saat sholat terawih di masjid Raya Tua Tunu Indah. Tidak hanya menyatakan pendapatnya tentang calon yang dipilihnya...”*

Arahma Sindita juga mengutarakan persepsinya yang bukannya tidak suka dengan ketiga kandidat dan juga bukan karna ketiga kandidat tidak memiliki visi misi, tetapi yang bersangkutan melihat kinerja mereka sebelumnya yang kurang sekali pada saat mereka memimpin, bahkan apa yang mereka bicarakan di visi-misi mereka sangat berbeda dengan tindakan yang mereka ambil. Disini Arahma juga mengungkapkan beberapa pendapatnya yang tidak memilih kandidat yang lain sebagai berikut:

1. Yusron – Yusroni

*“Beliau ini adalah seorang Duta besar di Indonesia dan lama tinggal di Jepang, bahkan beliau menyelesaikan pendidikan di salah satu Universitas yang ada di Jepang. Dari situ saya belum mengenal banyak tentang beliau dan saya belum melihat hasil kerja yang beliau lakukan di daerah Kep.Bangka Belitung.”*

2. Rustam – Irwansyah

*“Mereka berdua ini pernah menjabat sebagai Gubernur dan Walikota. Melihat pada masa kepemimpinan mereka sebelumnya, saya melihat tidak ada perubahan sama sekali yang terjadi di provinsi Kep.Bangka Belitung dan kota Pangkalpinang. Mereka hanya memberi janji tanpa memberi bukti yang nyata.”*

3. Dayat – Sukirman

*“Bapak Dayat ini beliau adalah mantan Wakil Gubernur Kep.Bangka Belitung. Beliau mendampingi bapak Rustam pada saat menjadi Gubernur di daerah Kep.Bangka Belitung dan saya juga melihat tidak ada pergerakan dan perkembangan pada masa mereka memimpin di Provinsi Kep.Bangka Belitung.”*

Dari pemaparan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja menjadi bukti nyata bagi seseorang untuk membuktikan dan menyampaikan bahwa dirinya punya kualitas dan kompeten. Perihal tersebutlah yang membuat Erzaldi dipilih sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022. Keberhasilannya dalam memimpin Kabupaten Bangka Tengah selama dua periode menjadi bukti bahwa Erzaldi dipercaya oleh masyarakat sebagai pemimpin yang memiliki kualitas. Kepercayaan masyarakat Bangka Tengah kala itu seolah menjawab suksesnya pencapaian kerja Erzaldi sebagai pemimpin.

### **1.3 Memilih Kandidat yang Memberikan Keuntungan**

#### **1.3.1 Politik Uang**

Pilkada serentak 2017 usai dilaksanakan. Masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih dan dipilih menyalurkan hak politiknya pada 15 Februari 2017. Ada 101 wilayah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada gelombang pilkada serentak kedua ini. Tujuh pilkada di tingkat provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten. Pelaksanaan pilkada serentak gelombang kedua ini khusus bagi daerah yang akhir masa jabatan kepala dan wakil kepala daerahnya berakhir antara Juli 2016 dan Desember 2017.

Berkaitan dengan Pilkada sikap pragmatis merupakan suatu gejala yang sebetulnya positif kalau pragmatisme itu diartikan mencari peluang yang paling besar untuk memenangkan calon. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tingkah laku politik merupakan pencerminan dari budaya politik suatu masyarakat yang penuh dengan aneka bentuk karakter dan aneka bentuk kelompok dengan berbagai tingkah lakunya.

Perilaku politik tidak ditentukan oleh situasi temporer, tetapi mempunyai pola yang berorientasi pada pola temurun (*common orientation*) yang tampak secara jelas sebagai pencerminan budaya politik yang seringkali disebut peradaban politik. Dengan demikian, perilaku politik tumbuh atas kesadaran yang mendalam tentang sistem politik yang berlangsung atau ideologi dalam suatu negara (Almond, 1995).

Seorang pragmatis tidak akan peduli kubu politik mana yang menang dan hanya peduli pada seberapa baik kebijakan telah berjalan. Pragmatisme politik adalah ciri khas kultur politik dalam masyarakat yang berprinsip “*yang penting sesuatu/program berfungsi, tak peduli caranya*”. Singkat kata, pragmatisme adalah penolakan terhadap teori dan ideologi dan lebih memilih fakta dan realitas yang telah teruji, namun, sisi negatif pragmatisme ketika pemilih pemula berhadapan persoalan ekonomi.

Pemilih pemula yang pragmatis akan mudah dipengaruhi oleh politik uang berbentuk bantuan dalam bungkus stimulan pembangunan masyarakat. Pada pelaksanaan pilkada serentak gelombang kedua ini, praktik politik uang tetap terjadi. Padahal beragam upaya sudah dilakukan penyelenggara agar praktik ini tidak muncul. Seperti lahirnya regulasi tentang aturan politik uang hingga ancaman yang dapat menjerat bagi pelaku. Sayangnya, kasus ini tetap muncul.

Besarnya tantangan demokrasi dalam bentuk pemilihan umum (pemilu) atau pilkada pada masa mendatang membuat kita harus berpikir keras untuk menjaga kualitas dari perhelatan demokrasi itu sendiri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan didukung oleh jajaran sampai tingkat yang paling bawah melalui Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum,

tertib hukum, keterbukaan, profesional, jujur dan adil berdasarkan hukum dan etika dengan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas.

Sebagai sebuah mekanisme, pemilu diharapkan dapat dilaksanakan secara bebas dan setara (*free and fair*). Dalam pelaksanaannya, pemilu di Bangka Belitung terlihat tidak sehat. Pemilu yang dinilai sebagai pesta demokrasi rupanya belum bisa mengimplementasikan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Karena, di dalam proses pelaksanaannya, pemilu masih disugahi kecurangan yang dilakukan oleh para peserta pemilu.

Salah satu bentuk kecurangan pemilu yakni adalah adanya praktik politik uang (*money politic*) (Permata, 2016). Reza Saputra, Taruna dari jurusan Nautika Kapal Niaga (NKN) saat diwawancarai pada hari Jum'at tanggal 10 November 2017 pukul 16:00 WIB di kelas XII NKN SMK Negeri 4 Pangkalpinang saat ditanya tentang politik uang, ketika Pak Erzaldi sering mengadakan event sederhana seperti jalan santai berhadiah, 17 Agustus, Erzaldi Cup dalam tournament sepak bola antara RT apakah merupakan kegiatan politik uang atau tidak, Rheza mengatakan bahwa itu bukan merupakan politik uang.

Hal tersebut diungkapkannya karena apa yang dilakukan oleh Pak Erzaldi tidak dalam kapasitasnya sebagai seorang calon kepala daerah yang sedang ikut pemilihan umum melainkan dilakukan saat masih menjabat sebagai Bupati Bangka Tengah.

Lain Rheza lain pula menurut Dion Saputra Prayoga Hermawan, Taruna dari jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI) saat diwawancarai pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 pukul 11:30 WIB di *front office* SMK Negeri 4 Pangkalpinang, ketika ditanya apakah politik uang dengan bentuk apapun ditemukan saat pemilu kala itu, Dion menjawab bahwa hal itu adalah hal yang umum dan bukan menjadi rahasia lagi hingga dikalangan pemilih pemula.

Hal yang menarik dalam konteks politik uang kali ini meskipun sudah biasa pula ditemukan ditempat lain Dion sebagai pemilih pemula tetap menjaga rasionalitas mereka dalam memilih dengan melihat terlebih dahulu kandidat yang diajukan, visi-misi hingga kinerja meskipun akan menerima juga pemberian politik uang dalam bentuk apapun.

Senada dengan hal tersebut saat diwawancarai secara terpisah di *lobby* SMK Negeri 4 Pangkalpinang pada Selasa tanggal 07 November 2017 pukul 12:00 WIB, Wahaidatul Lailia Mereka berangapan bahwa itu adalah rezeki dan “*yang namanya rezeki tidak boleh ditolak*”. Meskipun demikian, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya bahwa walaupun mereka menerima pemberian politik uang berbentuk bantuan, mereka tetap akan memilih dengan melihat terlebih dahulu kandidat yang diajukan, visi-misi hingga kinerja sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan pilihannya.

Munculnya praktik politik uang dari pemilu ke pemilu lainnya tak bisa dipungkiri menjelma menjadi tantangan besar demokratisasi. Karakteristik uang memberikan kemudahan. Uang dapat diubah ke berbagai macam sumber daya. Sebaliknya, berbagai macam sumber daya dapat diubah ke dalam uang. Uang juga dapat membeli barang, keahlian, dan layanan. Sebaliknya juga demikian. barang-barang, layanan, dan keahlian dapat dinilai dengan sejumlah uang. Tentu saja pemilik uang akan mempunyai pengaruh politik bagi peserta pemilu.

Politik uang menjadi potensi pelanggaran teratas yang dapat terjadi di TPS. Politik uang secara umum dapat dikategorisasi menjadi tiga dimensi: *vote buying*, *vote broker*, dan korupsi politik (Irawan, dkk. 2014). *Vote buying* merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang dengan suara dalam pemilihan umum dan orang yang mewakili kandidat/partai untuk membeli suara adalah *vote broker* sedangkan korupsi politik adalah segala bentuk suap kepada politisi dalam rangka mendapatkan kebijakan yang menguntungkan atau keuntungan lainnya.

Pelanggaran politik uang yang banyak terjadi pada masa tenang adalah *vote buying*. Secara harfiah, *vote buying* merupakan pertukaran ekonomi sederhana “*kandidat membeli dan warga menjual suara*”. *Vote buying* atau pembelian suara biasanya berbentuk pemberian atau hadiah terutama dalam bentuk uang, barang berharga, atau janji dengan tujuan memengaruhi perilaku penerima.

*Vote buying* dilakukan pada menit terakhir, beberapa hari, atau beberapa jam menjelang pemilihan. Inilah yang biasa disebut dengan “serangan fajar.” Proses barter uang atau barang dengan pemilih biasanya tidak melibatkan kandidat secara langsung.

Selain mudah diketahui oleh lawan politik, risikonya tinggi karena bisa dianulir sebagai peserta pemilihan karena itu kandidat membentuk tim yang berperan dalam menentukan strategi kemenangan, termasuk didalamnya melakukan politik uang sebagai bagian dari strategi untuk memenangkan persaingan. Pelaku politik uang didominasi oleh tim sukses yang dibentuk oleh kandidat. Selain itu, banyak pula kandidat yang menggunakan jasa broker suara yang tidak dicantumkan secara resmi dalam tim kampanye mereka.

Pelaku politik uang lainnya adalah birokrasi. Hal tersebut umumnya terjadi ketika petahana mencalonkan diri atau mencalonkan keluarganya dalam pilkada. Birokrasi yang terlibat mulai dari tingkat atas hingga terbawah seperti RT/RW. Pada instansi yang mengelola anggaran seperti dinas-dinas, sumber politik uang berasal dari anggaran yang dimiliki instansi tersebut. Malah, tidak sedikit kandidat yang mengombinasikan tim sukses, broker, dan birokrasi dalam melakukan politik uang.

Modus utama politik uang adalah pemberian secara langsung kepada pemilih. Caranya dengan membagikan uang kepada peserta temu kader, membagikan uang kepada massa kampanye, serangan malam, serangan fajar, atau pasca pencoblosan.

Modus kedua adalah pemberian uang secara tidak langsung, terutama melalui kepala desa dan perangkatnya, tokoh agama, atau broker-broker lainnya. Selain modus lama, beberapa modus baru yang ditemukan dalam pemilu adalah pemberian atau pemutihan kredit, pemberian door prize, pembagian asuransi, pembagian sembako, pembagian kerudung, sarung sajadah, helm, dan bentuk pakaian lain.

Pada kenyataannya praktik politik uang tumbuh dan berkembang dengan pesat dikarenakan terdapat begitu banyak modus yang digunakan oleh kandidat dalam melancarkan aksinya. *Identity personal* yang ditunjukkan oleh Erzaldi tidak hanya mengunggulkan gaya komunikasinya yang efisien dengan menjalin hubungan keberbagai elemen masyarakat mulai dari partisipan politik aktif, politik warung kopi hingga masyarakat muda milenial, tetapi juga menunjukan dirinya sebagai pemimpin yang bersahaja sebagai seorang muslim.

Kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan dengan menyelenggarakan pengajian, mendatangkan ulama hingga berkumpul dengan pemuka agama tidak menutup kemungkinan terjadinya praktik politik uang. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa dalam menyelenggarakan sebuah kegiatan dalam kampanye pasti membutuhkan uang dan ketika siklus perputaran uang terjadi maka potensi praktik politik uang pun akan terjadi tidak terkecuali dalam kegiatan keagamaan.

Dengan menyelenggarakan kegiatan dan mengundang pemuka agama tak ubah layaknya seperti acara dalam pertunjukan dangdut dimana dalam mensukseskan acara tersebut pasti akan membutuhkan biaya. Kandidat akan menggunakan uang yang ada untuk menyelenggarakan acara keagamaan agar dapat menarik perhatian masyarakat untuk berkumpul disana. Seperti yang sudah dikatakan, pada dasarnya konsep mengadakan kegiatan keagamaan ini sama dengan kegiatan kampanye lainnya seperti konser dangdut, makan bersama dan lain sebagainya.

Perbedaannya terletak pada sasaran massa yang dituju dan cara mengemas praktik politik uang tersebut. Fenomena “pilkada agama” yang terjadi pada tahun 2017 di DKI Jakarta tak ayalnya memberikan pengaruh pada pola pikir masyarakat dalam pemilu. Meskipun tidak menimbulkan gesekan sosial ditengah masyarakat namun kegiatan keagamaan ini nyatanya mampu mencuri perhatian masyarakat akan kemunculan pemimpin muslim yang membawa harapan besar untuk pembangunan.

Bisa dikatakan bahwa praktik kampanye dengan mengadakan kegiatan keagamaan justru terlihat lebih elegan dalam menjangkau suara masyarakat, jika sebelumnya aplikasi politik uang dapat berupa barang yang materiil seperti uang, baju kaos, sembako, dll, maka dalam kegiatan keagamaan tersebut politik uang dimanifestasikan dengan sebuah acara, biaya narasumber, dll.

Tanpa disadari konsepsi politik uang yang selama ini terjadi dengan memberikan bentuk materiil justru dibelokkan menjadi politik uang dalam pola imateriil seperti mengadakan acara tanpa hadiah namun berorientasi pada kesenangan dan kepuasan masyarakat bahwa calon pemimpin mereka dianggap sejalan beriringan dengan mereka.

Perilaku-perilaku seperti ini sama bahaya dengan perilaku lain yang tetap menggunakan politik uang. Pendidikan politik masyarakat sudah seharusnya dituntut untuk terus terbuka dan berkembang bahwa konsepsi politik uang tidak hanya berbentuk materiil sebatas uang, baju dan beras tetapi juga dapat berbentuk imateriil seperti acara hiburan sosial masyarakat hingga dakwah keagamaan.

Sepanjang acara tersebut bisa menarik massa dan memberikan kepuasan secara imateriil karena masyarakat merasa puas maka praktik politik uang sejatinya sedang berjalan. Hal tersebut dapat terjadi karena pada dasarnya semua aktifitas kampanye dilakukan dengan biaya dan orientasi pragmatis yang berlangsung selama ini adalah bagaimana caranya agar biaya yang sudah dikeluarkan tadi dapat dikembalikan bahkan bisa memberikan keuntungan.

Dari pemaparan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Taruna/i belum berani mengambil sikap yang konsisten dan professional perihal tindakan *money politic* untuk menolak pemberian dalam bentuk apapun, oleh siapapun, kapanpun dan dengan maksud apapun bahkan meski dengan atau tanpa maksud tertentu, walaupun demikian Taruna/i mengatakan bahwa meskipun para calon maupun timses melakukan praktik *money politic*, hal tersebut tidak akan mempengaruhi mereka dalam menentukan pilihan.

### 1.3.2 Pendidikan dan Kesadaran Politik Bagi Taruna

Pakar politik dari Universitas Tadulako Palu, Darwis M.Si mengatakan bahwa:

*“pemilih pemula harus diberikan pendidikan politik yang mencerdaskan dan bukan dengan memberikan pendidikan politik uang”.*

Pendidikan politik yang bisa diberikan kepada pemilih pemula bisa berupa pemahaman tentang pemilu dan siapa yang dia inginkan untuk menjadi wakil atau pemimpin. Lebih lanjut Darwis mengatakan bahwa, jika pendidikan politik yang diberikan keliru, maka akan berdampak secara terus menerus dari pemilu ke pemilu, yang nantinya akan berimbas pada kualitas sistem politik yang tidak bagus yang dikarenakan pendidikan politik yang tidak bagus pula.

Pendidikan politik adalah cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi satu ke generasi kemudian (Panggabean, 1994:36 ). Sedangkan budaya politik adalah keseluruhan nilai, keyakinan empiris dan lambang ekspresif yang menentukan terciptanya situasi ditempat kegiatan politik terselenggara. Pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa, mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Dengan kata lain pendidikan politik menginginkan agar Taruna/i berkembang menjadi warganegara yang baik, yang menghayati nilai-nilai dasar yang luhur dari bangsanya dan sadar akan hak-hak dan kewajibannya di dalam kerangka nilai-nilai tersebut. Nilai kebudayaan remaja antara lain adalah santai, bebas dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan dihindari.

Di samping mencari kesenangan, kelompok sebaya atau "*peer group*" adalah penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan. Masa pubertas merupakan tahap permulaan perkembangan perasaan sosial. Pada masa ini timbul keinginan remaja untuk mempunyai teman akrab dan sikap bersatu dengan teman-temannya, sedangkan terhadap orang dewasa mereka menjauhkan diri.

"*peerculture*" ini berpengaruh sekali selama masa remaja sehingga nilai-nilai kelompok sebaya mempengaruhi kelakuan mereka. Seorang remaja membutuhkan dukungan dan consensus dari kelompok sebayanya. Dalam hal ini setiap penyimpangan nilai dan norma kelompok akan mendapat celaan dari kelompoknya, karena hubungan antara remaja dan kelompoknya bersifat solider dan setia kawan. Pada umumnya para remaja atas kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan persamaan dalam minat, kesenangan atau faktor lain.

Dari pemaparan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan politik perlu ditingkatkan sebagai kesadaran dalam berpolitik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga Taruna/i diharapkan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan. Pendidikan politik mengupayakan penghayatan atau pemilikan Taruna/i terhadap nilai-nilai yang meningkat dan akan terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam hidup kemasyarakatan termasuk hidup kenegaraan serta berpartisipasi dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing.